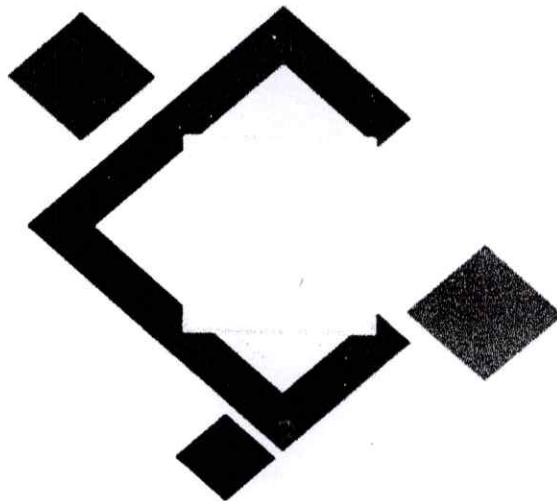


RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)

**KANTOR CAMAT TENGGARONG SEBERANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Jalan Mulawarman No.01 Telp. (0541) 7242743

Kode Pos 75262 TENGGARONG SEBERANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan yang dikenal dengan nama KUKAR IDAMAN (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2025 serta keberhasilan (success story) pada pelaksanaan pembangunan GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK PD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra -SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD
4. Permendagri No.54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pada Lampiran VI.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistem Matika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

B. Analisis Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program

C. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KOTAWA BARU

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	TARGET PROGRAM CAPAIAN KINERJA (RENSTRA SKPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN PROGRAM S/D TAHUN (-5) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (-5) 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENA SKPD N) TAHUN 2022	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45				100%	9	9	20%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	10	2	2	100%	2	2	20%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	2	2	100%	2	2	20%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5			100%	1	1	20%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	55				100%	11	11	20%
		Tersedianya gaji dan tunjangan	60				100%	12	12	20%
		Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15				100%	3	3	20%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	60	60	12	12	100%	12	12	20%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20				100%	4	4	20%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Actir Tahun SKPD	5	5	1	1	100%	1	1	20%

Kecamatan Tenggarong Seberang

7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15						100%	3	3	20%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	20	20	4	4			100%	4	4	20%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10						100%	2	2	20%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	15						100%	3	3	20%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5						100%	1	1	20%
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-									
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5						100%	1	1	20%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	5						100%	1	1	20%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	375						100%	75	75	20%
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	370						100%	74	74	20%
		jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	5						100%	1	1	20%
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-									
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	370	71					100%	74	74	20%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	370						100%	74	74	20%
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	5						100%	1	1	20%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5						100%	1	1	20%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20						100%	4	4	20%
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-									
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15						100%	3	3	20%

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45					100%	9	9	20%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	30	6	6		100%	10	10	20%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	300	150	30	30		100%	60	60	20%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	215	30	6	6		100%	43	43	20%
		Jumlah Makanan dan Minuman	4.800	145	29	29		100%	960	960	20%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	876.940	95	19	19		100%	175388	175388	20%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	1.800					100%	360	360	20%
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	60					100%	12	12	20%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	475	300	60	60		100%	95	95	20%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	400					100%	80	80	20%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5					100%	1	1	20%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100					100%	100	100	20%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5					100%	1	1	20%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel										
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100					100%	100	100	20%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Monev	Jumlah Materi yang disediakan	2.315	5.740	1.148	1.148		100%	463	463	20%

7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	720	144	144	100%	12	12	20%
7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	60	12	12	100%	12	12	20%
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	60	12	12	100%	12	12	20%
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	240				100%	48	48	20%
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	50	65	13	13	100%	10	10	20%
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	50	65	13	13	100%	10	10	20%
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	125				100%	25	25	20%
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	5	1	1	100%	1	1	20%
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP								
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5				100%	1	1	20%
7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi di Wilayah Kecamatan	5				100%	1	1	20%

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	545					100%	1	1	20%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		-								
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	500					100%	100	100	20%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	45					100%	9	9	20%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100						100	100	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan						100%	100	100	20%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100			90	18	100%	100	100	20%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	90			90	18	100%	18	18	20%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100						100	100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya Disiplin aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Belum adanya SPM Kecamatan Tenggarong Seberang
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kutai Kartanegara
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Tabel 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2018 (Tahun n-2)	Tahun 2019 (Tahun n-1)	Tahun 2020 (Tahun n)	Tahun 2021 (Tahun n+1)	Tahun 2018 (Tahun n-2)	Tahun 2019 (Tahun n-1)	Tahun 2020 (Tahun n)	Tahun 2021 (Tahun n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	76%	82%	100%	100%		
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		Prosentase Sarana dan Prasarana yang diadakan	88%	63%	63%	63%	50%	63%	63%	63%		
3	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur		Prosentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	67%	100%	67%	67%	0%	0%	67%	67%		
4	Rata-rata nilai Kinerja SKP		Prosentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%		
5	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		Prosentase Kinerja yang diCapai	100%	86%	86%	86%	43%	86%	100%	100%		
6	Prosentase Ketepatan Waktu Pelayanan		Prosentase Waktu Pelayanan	94%	94%	100%	100%	24%	50%	100%	100%		
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat		Prosentase Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	12%	23%	100%	100%		
8	Cakupan Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik		Prosentase Jalan dan Jembatanan yang direhabilitasi/dipelihara	100%	100%	100%	100%	43%	57%	100%	100%		
9	Cakupan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan dalam kondisi baik		Prosentase Infrastruktur Kecamatan yang dibangun	100%	100%	100%	100%	25%	38%	100%	100%		
10	Cakupan Sarana dan Prasarana Umummm Kecamatan Dalam Kondisi Baik		Prosentase Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan yang direhabilitasi/dipelihara	100%	100%	100%	100%	20%	20%	100%	100%		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Tenggarong Seberang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang pada Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang religius.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2022 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Kecamatan Tenggarong Seberang	
			Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif
			Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Pagu Indikatif		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAPK Perangkat Daerah		9.446.764.254	9.446.764.254	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	40.000.000	9 Dokumen	340.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	180.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	11 Laporan	7.096.607.994	11 Laporan	7.096.607.994
			Tersedianya gaji dan tunjangan	12 Bulan		12 Bulan	
			Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali		3 Kali	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Tersedianya gaji dan tunjangan	12 Bulan	6.956.607.994	12 Bulan	6.956.607.994
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali	5.000.000	3 Kali	5.000.000

7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000
7.01.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3 Dokumen	48.900.000	3 Dokumen	48.900.000
7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000
7.01.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	40.800.000	1 Laporan	40.800.000
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	75 Dokumen	161.000.000	75 Dokumen	161.000.000
				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	74 Unit		74 Unit	
				jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1 Unit		1 Unit	
7.01.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	74 Unit	114.000.000	74 Unit	114.000.000
7.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	74 Dokumen	4.000.000	74 Dokumen	4.000.000
7.01.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000
7.01.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000
7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Tenggarong Seberang					
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan	745.256.260	9 Layanan	745.256.260
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	29.413.760	10 Jenis	29.413.760
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Jenis	85.000.000	60 Jenis	85.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	43 Jenis	27.790.900	43 Jenis	27.790.900
		Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Makanan dan Minuman	960 Porsi	72.209.100	960 Porsi	72.209.100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	175388 Unit	70.155.000	175388 Unit	70.155.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	360 Buku	3.600.000	360 Buku	3.600.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Orang	50.000.000	12 Orang	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	95 Rapat	307.087.500	95 Rapat	307.087.500
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Camat Tenggara Seberang	Tata Kelola Arsip	80 Nilai	50.000.000	80 Nilai	50.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	180.000.000	100 Persen	180.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	180.000.000	1 Unit	180.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				-		-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	440.100.000	100 Persen	440.100.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Materi yang diadakan	463 Lembar	5.100.000	463 Lembar	5.100.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	48 Unit	435.000.000	48 Unit	435.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	125.000.000	10 Unit	125.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	25 Unit	25.000.000	25 Unit	25.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		27.920.000.000		27.920.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Fasilitasi	30.000.000	1 Fasilitasi	30.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	27.890.000.000	1 Kegiatan	27.890.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	9 Kegiatan	27.860.000.000	9 Kegiatan	27.860.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	330.000.000	100 Persen	330.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	330.000.000	100 Persen	330.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	18 Kegiatan	300.000.000	18 Kegiatan	300.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						

7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Tenggaraong Seberang	Terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kantor camat	27 orang	186.000.000	27 orang	186.000.000
7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Tenggaraong Seberang	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	18 Kegiatan	15.844.122	18 Kegiatan	15.844.122
JUMLAH						37.953.608.376		37.953.608.376

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tenggarong Seberang maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun

pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan Tujuan Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatkan Produktifitas dan Efektifitas Aparatur Kecamatan;
3. Akuntabilitas dan Peningkatan Capaian Kinerja;
4. Optimalisasi Penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Kapasitas Kewenangan yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat;
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Data secara Profesional dan berbasis Teknologi Informasi;*
2. *Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Kewenangan dan Tupoksi Kecamatan;*
3. *Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Komprehensif (lengkap) dan Tepat Waktu sesuai ketentuan;*
4. *Meningkatkan PAD Kecamatan yang bersumber dari Retribusi Perijinan dan*

Non Perijinan;

5. *Meningkatkan Semangat Gotong Royong, Swadaya, Prakarsa dan Inisiasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Membangun Desa dan Kecamatan ;*
6. *Optimalisasi Fungsi dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase/Gorong-Gorong di Wilayah Kecamatan dan Desa;*
7. *Pembangunan Ruas Badan Jalan untuk menjangkau sentra produksi pertanian, menunjang distribusi hingga pemasaran hasil-hasil pertanian serta mendukung promosi destinasi wisata daerah*
8. *Pembangunan Sarana Pemerintahan, Sentra Wisata, Irigasi Pertanian, Sanitasi Lingkungan, Pasar Kecamatan/Desa, Sarana Listrik PLN, dan Air Minum Sehat.*
9. *Penanganan STUNTING secara maksimal.*
10. *Menciptakan Kampung Tangguh Covid.*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui instansi terkait dalam musrenbang kecamatan setiap tahunnya.

Pengolahan data menyangkut program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan lagi dengan kondisi lapangan bahkan ketersediaan dana sebagai pendukung dari program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bila kondisi lapangan kesiapan sumber daya dan anggaran tidak ada kesesuaian maka program kegiatan yang telah direncanakan bisa saja belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau bahkan gagal.

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur / Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			9.446.764.254	9.446.764.254
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	340.000.000	9 Dokumen	340.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	180.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	11 Laporan	7.096.607.994	11 Laporan	7.096.607.994
			Tersedianya gaji dan tunjangan	12 Bulan		12 Bulan	
			Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali		3 Kali	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Tersedianya gaji dan tunjangan	12 Bulan	6.956.607.994	12 Bulan	6.956.607.994
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali	5.000.000	3 Kali	5.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3	Dokumen	48.800.000	3	Dokumen	48.800.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	4.000.000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					-			-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	40.800.000	1	Laporan	40.800.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	75	Dokumen	161.000.000	75	Dokumen	161.000.000
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	74	Unit		74	Unit	
			umiah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1	Unit		1	Unit	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					-			-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	74	Unit	114.000.000	74	Unit	114.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	74	Dokumen	4.000.000	74	Dokumen	4.000.000
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1	Unit	4.000.000	1	Unit	4.000.000
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.000.000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	Orang	20.000.000	4	Orang	20.000.000
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Tenggarong Seberang				-			-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Layanan	745.256.260	9	Layanan	745.256.260
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Jenis	29.413.760	10	Jenis	29.413.760
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	Jenis	85.000.000	60	Jenis	85.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	43	Jenis	27.790.900	43	Jenis	27.790.900

7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	125.000.000	10 Unit	125.000.000
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000
7.01.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	25 Unit	25.000.000	25 Unit	25.000.000
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		27.920.000.000		27.920.000.000
				Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000
7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Fasilitasi	30.000.000	1 Fasilitasi	30.000.000
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	27.890.000.000	1 Kegiatan	27.890.000.000
7.01.02.2.04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
7.01.02.2.04.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000
7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	9 Kegiatan	27.860.000.000	9 Kegiatan	27.860.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Lumbago Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	330.000.000	100 Persen	330.000.000
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	330.000.000	100 Persen	330.000.000

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Tenggara Seberang	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				-		-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tenggara Seberang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	18 Kegiatan	300.000.000	18 Kegiatan	300.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	-	100 Persen	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-		-
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-		-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				-		-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90 Persen	256.844.122	90 Persen	256.844.122
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 Kegiatan	256.844.122	3 Kegiatan	256.844.122

			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Desa Yang difasilitasi	18 Desa	18 Desa	25.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	15.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	9 Kali	9 Kali	15.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kantor Camat	27 orang	27 orang	186.000.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Tenggarong Seberang	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	15.844.122
JUMLAH				37.953.608.376		37.953.608.376

BAB V

PENUTUP

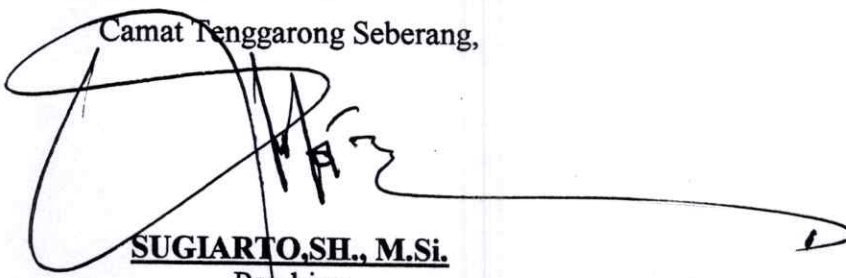
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Komunikasi/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Tenggarong Seberang, Juli 2021

Camat Tenggarong Seberang,


SUGIARTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19720112 200604 1 01